

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUDGETING DALAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIKAN DI MAN 5 ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HAPIDAH AINI

NIM :140206064

**Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 2019 H**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUDGETING DALAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN DI MAN 5 ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan Islam

Oleh

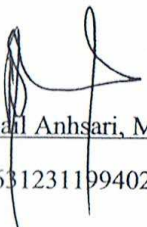
Hapidah aini

Nim:140206064

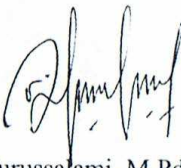
Mahasiswa Tarbiyah dan Keguruan
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Ismail Anhsari, M.A
Nip.196312311994021002

Pembimbing II


Nurussafami, M.Pd
Nip.197902162014112001

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUDGETING DALAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN DI MAN 5 ACEH BESAR**

SKRIPSI

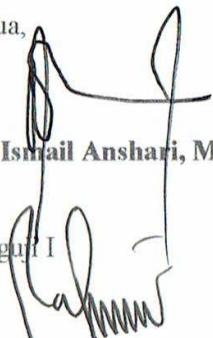
**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Pendidikan Islam**

Pada Hari/Tanggal,

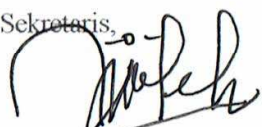
Sabtu, 30 juni 2018 M
08 Syawwal 1439 H

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Ismail Anshari, MA

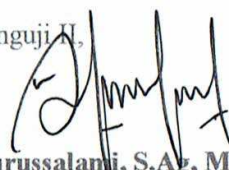
Sekretaris,


Ainul Mardhiah, MA, Pd

Penguji I

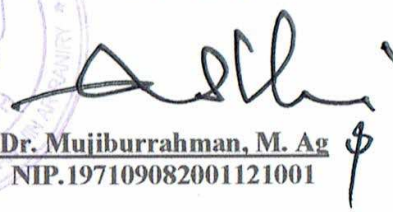

Dr. Sri Rahmi, MA

Penguji II,


Nurussalam, S.Ag, M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Mujiburrahman, M. Ag
NIP.197109082001121001



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Hapidah Aini
NIM : 140206064
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

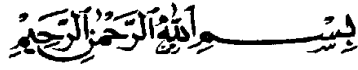
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar** adalah benar karya asli saya, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 juli 2018

 menyatakan
000
RIBU RUPIAH
(Hapidah Aini)
NIM: 140206064



Ya Allah. . .Sepercik ilmu telah engkau karuniakan kepadaku...
Hanya sepercik kecil dari apa yang Engkau miliki ya Allah...
Sebagaimana firman-Nya:

Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi menjadi pena dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan ditulis, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana" (QS. Lukman: 27)

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Shalawat beriringkan salam Nabi Besar Muhammad saw sehingga dapat menikmati keindahan ilmu pengetahuan.

Atas ridha Allah karya sederhana ini kupersembahkan dengan sepenuh cinta kepada almarhum ayah saya dan kepada ibu yang telah mendidik kami dalam kesendirian dari kecil sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada semua anaknya, sesungguhnya walaupun ayah tidak lagi berada bersama kami secara dzahir namun kau tetap hidup bersama orang-orang yang diridhoi Allah Insya Allah, semoga ayah tenang dan ditempatkan pada tempat terbaik. Aamiin ya Rabb

Untuk kakak-kakakku tercinta dan terkasih Fatimah, Maimunah S.Pd., juga kepada abangku Darwinsyah , M.Yunus S.Pd.I,yang telah menjadi wali dan penerang dalam hidupku, pengganti orang tuaku, sesungguhnya semua kebaikanmu akan dibalas dengan sesuatu yang lebih baik, yang telah memberikan motivasi, material, dan doa untuk keberhasilan penulis, semoga karya sederhana ini dapat meringankan beban sekaligus menjadi jawaban doa selama ini

Keluarga besarku dari keluarga ibu dan ayah yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun dukungan berupa doa, moril dan

materil senantiasa diberikan untuk memberikan semangat dan motivasi tersendiri kepada penulis.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya surya dewi,roslina, marwan,rika noverta, maryam, cut nurul aini,zul kifli, jumratul aini, Ramaida, andira novita yang telah menemani dan memberikan motivasi selama penulis menuntut ilmu

Terima kasih kepada kakak leting ruwaida,cut siska andriani, halimah, muhammad amin yang telah banyak memberikan motivasi yang tidak bisa saya balas dengan tenaga yang bisa membalasnya hanyalah allah SWT.

Kepada sahabat MPI 2014 khususnya unit 2, semoga persahabatan kita tidak berakhir setelah menyelesaikan studi ini, dan terima kasih atas semuanya waktu, pikiran, serta motivasi dalam menyelesaikan karya ini

Kepada sahabat barakah kost, persimagal,hipemagas yang terus berjuang menjadi generasi-generasi emas dan harapan baru bangsa ini, semoga cita-cita bersama dapat tercapai, terima kasih telah mengisi waktu pelajaran hidup, banyak hal yang tidak penulis dapatkan selama bangku kuliah namun disinilah ada ilmu-ilmu spesial yang berharga dalam menjalankan sebaik-baik hidup.

Terima kasih juga kepada sahabat PPL 2018 MIN 31 Pidie, dan Spesial buat sahabat KPM 2018 desa Didoh yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman hidup, terima kasih atas segalanya.

Kepada semua sahabat dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun jasa teman-teman selalu teringat dalam memori dan dibungkus rapi dalam hati, semoga semua indah pada waktunya.

Semoga rahmat dan karunia Allah senantiasa diberikan kepada hambanya untuk kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat.

Aamiin ya Allah Aamiin ya Rabb Aamiin ya Rahman Aamiin ya Rahim.

Hapidah Aini, S.Pd

ABSTRAK

Nama : Hapidah Aini
Nim : 140206064
Fakultas/Prodi : Tarbiyah/Mnanajemen Pendidikan Islam
Judul : Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar
Tebal Skripsi : 73
Pembimbing I : Dr. Ismail Anshari, M.A
Pembimbing II : Nurussalami, M.Pd
Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan, Budgeting, Mutu Pendidikan,

Kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pendidikan dalam menghadapi dan menangani sebuah masalah yang membuahkan sebuah keputusan dari semua stakeholder yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Akan tetapi kebijakan ini sering terjadi kekeliruan di dalam sebuah pendidikan. Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar, untuk mengetahui kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara. Teknik pengumpulan data penelitian adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah MAN 5 Aceh Besar telah melaksanakan kebijakan yang baik dalam pengelolaan budgeting untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut, adapun yang dapat membuktikan yaitu dalam bentuk ekstrakurikuler yang telah banyak didapatkan penghargaan dari luar dalam mengikuti sebuah pertandingan oleh siswa/i MAN 5 Aceh Besar. Kendala-kendala yang dihadapi di sekolah ini dalam pengelolaan budgeting untuk peningkatan mutu pada saat ini adalah salah satunya kurangnya dana yang masuk ke sekolah MAN 5 Aceh Besar dan dalam pelaksanaan sering terjadi perbedaan pendapat.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah swt, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Salawat beriringkan salam kita sanjung dan sajikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian yang karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermaknanya dan betapa sejuhnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **“Kebijakan Pengelolaan Budgeting Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar”** Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi beban studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pihak akademik dan pihak non-akademik. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian. Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam, para staf dan jajarannya, Penasehat Akademik (PA) Fatimah Ibda, M.Si, yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. Dr. Ismail Anshari, M.A, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dan meluangkan

waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Nurussalami, M.Pd selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini. Kawan-kawan seperjuangan angkatan kuliah 2014 prodi MPI yang telah bekerja sama dalam menempuh dunia pendidikan dan saling memberi motivasi. Dan Kepala MAN 5 Aceh Besar, Bendahara, serta para staf yang telah membantu penelitian serta memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan teristimewa untuk ayah dan ibu yang telah mendidik kami dari kecil sehingga menjadi anak-anak yang senantiasa berusaha memberikan yang terbaik kepada kami anak-anaknya. Abang, Kakak, serta keluarga yang selalu memberikan motivasi, material, dan doa untuk keberhasilan penulis.

Mudah-mudahan atas partisipasi dan motivasi yang sudah diberikan sehingga menjadi amal kebaikan dan mendapat pahala yang setimpal di sisi Allah SWT. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan ilmu penulis. Oleh karena itu penulis harapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, dan demi berkembangnya ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Terdahulu yang Relevan	8
G. Sistematika Penulisan	9
 BAB II : LANDASAN TEORITIS	 12
A. Kebijakan Pengelolaan Budgeting	12
1. Pengertian kebijakan	12
2. Komponen kebijakan	13
3. Konsep Budgeting.....	17
4. Jenis Budgeting.....	20
5. Sumber Budgeting.....	21
6. Ruang Lingkup Budgeting	23
B. Mutu Pendidikan	32
1. Pengertian Mutu Pendidikan	32
2. Konsep Peningkatan Mutu Pendidikan	34
3. Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan	37
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 40
A. Rancangan Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisis Data	43
F. Uji Keabsahan Data	45
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan Penelitian	68
1. Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan Budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar	68
2. Kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting	

dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar	69
BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1: Program Kerja Kepala Sekolah Harian Per Minggu MAN 5 Aceh Besar	50
TABEL 4.2: Program Kerja Kepala Sekolah Harian Menurut Waktu MAN 5 Aceh Besar	51
TABEL 4.3: Data Sarana Prasarana MAN 5 Aceh Besar	56
TABEL 4.4: Keadaan Guru dan Karyawan MAN 5 Aceh Besar	58
TABEL 4.5: Keadaan Siswa MAN 5 Aceh Besar	59

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Izin Penelitian dari Dekan FTK UIN Ar-Raniry
- LAMPIRAN 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- LAMPIRAN 4 : Instrumen Observasi
- LAMPIRAN 5 : Instrumen Wawancara dengan Kepala Sekolah
- LAMPIRAN 6 : Instrumen Wawancara dengan Bendahara
- LAMPIRAN 7 : Instrumen Dokumentasi
- LAMPIRAN 8 : Dokumentasi Penelitian
- LAMPIRAN 9 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.¹

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengejaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu-mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pemimpin pendidikan, keterbatasan dana, sarana, dan prasarana, fasilitas pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Maka dari itu untuk meningkatkan mutu pendidikan butuh perencanaan yang sesuai dengan kemampuan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, agar pelaksanaannya dapat memuaskan dan sesuai dengan visi misi sekolah, dan juga pihak sekolah harus membentuk kelompok dalam melaksanakan sebuah program di sekolah, karena untuk meningkatkan sebuah mutu haruslah dengan kerjasama

¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000),h . 77

yang baik antara satu sama lain, setelah berjalannya suatu kegiatan maka seorang kepala sekolah harus melakukan evaluasi sejauh mana telah dicapai kegiatan yang direncanakan apa sudah sesuai dengan rencana awal atau belum.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada keterbatasan dana.²

Meskipun tidak sepenuhnya masalah keuangan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran. Dalam kaitan ini, meskipun tuntutan reformasi adalah pendidikan yang murah dan berkualitas, namun pendidikan yang berkualitas senantiasa memerlukan dana yang cukup banyak.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuangan pun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah memiliki tanggung jawab keuangan sekolah. Maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk

² E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.48

meningkatkan keuangan sekolah tersebut. Untuk menjadi kepala sekolah yang profesional dituntut kemampuan mengelola keuangan sekolah.³

Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, tinggal kelas dan prestasi belajar siswa.

Piet A Sahertian dan Frans Mutaher Mnejelaskan bahwa: “kepala sekolah sebagai suvervisor bertujuan untuk membantu memperbaiki dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya”⁴.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin sekaligus sebagai supervisi, memperbaiki serta menciptakan mutu pendidikan dan juga mengelola budgeting di lembaga pendidikan juga diketahui bahwa kepala sekolah sangatlah berperan penting dalam membina semua stakeholder yang ada di sekolah tersebut supaya kualitas sekolah akan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kebijakan dipandang sebagai proses pengkajian yang dirancang untuk menemukan solusi permasalahan yang sangat praktis. Pengkajian tersebut mengacu pada suatu proses penyelidikan atau mencari solusi. Kebijakan didasarkan pada kombinasi akal sehat dengan mengkhususkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan profesi, dan kemanusiaan. Oleh sebab itu kebijakan melibatkan pemahaman (nalar) manusia dalam memecahkan permasalahan.

³E Mulayasa, *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, (Bandung: Remaja Rosdakarya.2003) ,h.193

⁴Piet A Sahertian. Frans Mutaher, *Prinsip dan Tehnik supervisi pendidikan* (Jakarta reneka cipta,1981) , h.23

Kebijakan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pendidikan karena kebijakan merupakan suatu bentuk dasar rencana dalam melakukan suatu pekerjaan yang dibuat sepenuhnya secara rasional melalui optimalisasi strategi untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka usaha pencapaian tujuan secara maksimal. Kebijakan dianggap suatu posisi atau pendirian yang dikembangkan untuk menanggapi suatu masalah atau isu konflik dalam rangka pencapaian tertentu. Dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari seorang kepala sekolah untuk menangani sebuah masalah seperti salah satunya tentang pengelolaan budgeting di sekolah tersebut.

Berdasarkan observasi awal di MAN 5 Aceh Besar penulis melihat bahwa kinerja kepala sekolah Aceh Besar memiliki kinerja kepala sekolah berjalan efektif dan berkompetensi dalam meningkatkan mutu pendidikan hal ini di buktikan antara lain kepala sekolah melakukan supervisi terhadap guru-guru yang mengajar secara menyeluruh ke semua kelas di MAN 5 Aceh Besar, sistem input, proses, dan output semua berjalan dengan baik. Akan tetapi masih banyak permasalahan-permasalahan yang timbul di MAN 5 Aceh Besar seperti lokasi sekolah yang kurang strategis dimana parkir kreta terletak di depan ruangan kelas hal tersebut dapat mengganggu kegiatan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain itu juga bangunan yang kurang layak untuk dipakai proses pembelajaran di karenakan kaca jendela banyak yang sudah pecah dan banyak gangguan pada saat pembelajaran berlangsung seperti suara-suara dari luar dapat terdengar dan itu dapat menyebabkan siswa/i tidak konsen dalam belajar.

Berdasarkan latar belakang masalah ini maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “***Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar?
2. Bagaimana kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar
2. Untuk mengetahui kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Adapun uraian kegunaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan keilmuan terhadap ilmu manajemen pendidikan terutama manajemen keuangan dalam melaksanakan peningkatan mutu pendidikan.
- b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti-peneliti lain yang akan mengadakan penelitian serupa dimasa yang akan datang.

2. Secara Praktis

- a. Menjadi bahan masukan dan sekaligus referensi bagi kepala sekolah, bendahara dan seluruh stakeholder terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan.
- b. Dapat menambah pengalaman bagi seluruh stakeholder dalam peningkatan mutu pendidikan. Di samping itu juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif.

E. Defenisi Operasional

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau cara bertindak dari pendidikan dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

2. Pengelolaan

Pengelolaan dalam kamus besar bahasa indonesia berarti proses, pengelolaan adalah “proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan

tujuan organisasi.”⁵ Berdasarkan makna dalam kamus besar indonesia itu dapat disimpulkan bahwa kata pengelolaan memiliki kesamaan arti dengan kata proses. Adapun pengelolaan yang peneliti maksudkan adalah proses kepala sekolah tentang pengelolaan budgeting di MAN 5 Aceh Besar.

3. Budgeting

Budgeting dalam bukunya martin menjelaskan bahwa suatu proses pengalokasian sumber-sumber pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan.⁶Berdasarkan dalam bukunya martin dapat disimpulkan bahwasanya budgeting dalam pendidikan sangat dibutuhkan untuk menciptakan sebuah program-program di MAN 5 Aceh Besar.

4. Mutu pendidikan

Secara umum, mutu diartikan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.⁷ Sedangkan, pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia.⁸Jadi, mutu pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Sedangkan mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome.

Untuk meningkatkan sebuah pendidikan harus ada perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Dimana perencanaan ini merancang sebuah kegiatan yang akan dilakukan untuk pembelajaran seperti perehapan

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.,(Jakarta: Balai Pustaka,2005),h. 268

⁶Martin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2014)h.4.

⁷Jerome S. Arcaro,*Pendidikan Berbasis Mutu*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)h.75

⁸ Syaiful Bahri Djamarah.*Guru dan Anak Didik dalam Interaksi FF.duskatif*.(Jakarta: Rineka Cipta 2000)h. 22.

gedung supaya siswa nyaman dalam belajar, setelah adanya perencanaan maka pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam bentuk kerjasama seluruh stakeholder yang ada di sebuah lembaga pendidikan, maka dari itu setelah kegiatan sudah terlaksana kepala sekolah harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan di lembaga itu untuk mengetahui keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan.

F. Penelitian Terdahulu

Dinka Rizky Apriliana Mahanggi, dalam skripsinya yang berjudul “kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di sma negeri se-kabupaten purbalingga”, tahun 2014. Dalam skripsinya diteliti kebijakan kepala sekolah terhadap pelayanan BK mengimplementasikan kebijakan turunan dari kebijakan pendidikan nasional, akan tetapi diinovasi dan dikembangkan sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Secara umum kepala sekolah sudah mengetahui dan memahami peran serta tanggung jawab kepala sekolah terhadap pelayanan BK, tetapi dalam pelaksanaannya kepala sekolah kurang menerapkan pemahaman tersebut serta kurang melihat kebutuhan dari guru BK dan siswa.

Anjar wahyu wibawati, dalam skripsinya yang berjudul “strategi kebijakan kepemimpinan kepala sekolah terhadap pembinaan profesionalisme guru di SD Negeri Cabe, Rongkop, Gunung Kidul”, tahun 2014. Dalam skripsinya yang diteliti kebijakan kepala sekolah dalam pembinaan profesionalisme guru sudah sangat baik, seperti kepala sekolah mengadakan sharing, guru diikuti sertakan dalam pelatihan. Kompetensi profesionalisme guru SD negeri cabe

rongkop gunungkidul sangat baik, disamping guru-guru mengajar pada jam pelajaran juga penambahan jam pelajaran di luar jam pelajaran sehingga hasilnya memuaskan seperti dalam kelulusan, SD cabe mendapatkan peringkat 4 dari 25 sekolah UPT Rongkop Gunung Kidul.

Laelatun Nikmah, dalam skripsinya yang berjudul “kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan manajemen mutu pembelajaran pendidikan agama islam (studi di smpn 01 lasem)”, tahun 2010. Dalam skripsinya yang diteliti kebijakan yang dilakukan kepala sekolah terkait dengan mutu pembelajaran di SMPN 01 Lasem sudah dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat pada: pelaksanaan manajemen mutu pembelajaran di SMPN 01 Lasem, dalam melaksanakan manajemen pembelajaran ada beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, motivasi, fasilitas, dan pemberdayaan. Disini penulis tidak menemukan permasalahan yang begitu signifikan, karena Out Put yang dihasilkan menunjukkan adanya peningkatan yang baik.

Elly Puji Astutik, berjudul “ Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah Tentang Pembelajaran Praktek Renang Di SMP Negeri 1 Cerme Kabupaten Gresik”, volume Volume 2, Nomor 1, Januari 2014; 15-20 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615. Didalamnya meneliti Pembelajaran praktek renang di SMP Negeri 1 Cerme kurang baik dilihat dari jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran renang kurang lebih 60%. Faktor penunjang meliputi, adanya dukungan dari kepala sekolah, guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan

yang berkompeten, orang tua, manfaat renang. Faktor kendala, yaitu waktu pelaksanaan, biaya, sosialisasi, serta sarana dan prasarana.

Johandri Taufan, berjudul “Kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolah x kota jambi”. Meneliti tentang Kebijakan-kebijakan kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolah x kota jambi berjalan dengan baik. Masyarakat sekolah sangat mendukung kebijakan –kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah sebagai usaha-usaha kepala sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif disekolah x kota jambi.

Dari semua skripsi dan jurnal yang saya dapatkan semua membahas tentang kebijakan kepala sekolah tetapi kebijakan itu semua membahas yang berbeda yang pertama membahas tentang pelayanan bimbingan dan konseling, yang kedua membahas tentang pembinaan profesionalisme guru, yang ketiga membahas tentang meningkatkan manajemen mutu pembelajaran pendidikan agama islam, yang ke empat membahas tentang Pembelajaran Praktek Renang, dan yang ke lima membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dari peneliti ke 5 di atas sama-sama meneliti tentang kebijakan kepala sekolah tetapi sudut pandang yang berbeda dan saya akan meneliti tentang kebijakan pengelolaan Budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar.

G. Sistematika Penulisan yang Relevan

Sistematika penulisan proposal yang akan peneliti tulis terdiri dari beberapa bab. Bab I pendahuluan, bab II kajian teori/pustaka dan bab III metode

penelitian. Bab-bab yang akan disajikan dalam penulisan proposal ini yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian pada bab ini berisikan mekanisme penelitian yaitu menguraikan secara berurutan kegiatan penelitian mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kemudian ditutup dengan sistematika penulisan.

Dalam bab II peneliti akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul-judul, yaitu mengenai kebijakan, pengelolaan, budgeting, mutu, dan pendidikan.

Bab III mengenai uraian tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data, uji keabsahan data dan daftar pustaka.

Bab IV mengenai uraian tentang gambaran umum lokasi penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan hasil penelitian. Bab V mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kebijakan Pengelolaan Budgeting

1. Pengertian Kebijakan

Untuk memahami arti kebijakan yang berlaku umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, maka perlu disajikan beberapa pengertian kebijakan dari beberapa ahli:

- a. Patton dan Sawicki mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan.
- b. Duncan MacRae mengartikan kebijakan ini sebagai suatu disiplin ilmusosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai dan membuahkan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah.
- c. Stokey dan Zekhauser yang mengartikan suatu proses rasional dengan menggunakan metode dan tehnik yang rasional pula.

Kebijakan adalah suatu disiplin ilmu yang berupaya memecahkan masalah dengan menggunakan teori, metode, dan substansi penemuan tingkah laku dan ilmu-ilmu sosial, profesi sosial, dan filosofi sosial politis.¹

Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan suatu proses penyelesaian masalah yang bersifat pribadi ataupun berkelompok untuk meluruskan suatu perbedaan pendapat dengan

¹Nanang Fatta, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet I, h.3-5

menggunkan metode yang sesuai dengan masalah yang di temukan suatu lembaga pendidikan.

2. Komponen kebijakan

a. Perumusan masalah.

Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mediagnosis penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang kebijakan-kebijakan yang baru. Perumusan masalah adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan baik dari pertimbangan tujuan, strategi, maupun kepentingan lingkungan eksternal. Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung, yaitu:

- 1) Pencarian masalah (problem search) proses penemuan dan penyatuan beberapa representasi masalah yang dihasilkan oleh para pelaku kebijakan
- 2) Pendefinisian masalah (problem definition) proses mengkarakteristikan masalah-masalah substantif kedalam istilah-istilah yang paling dasar dan umum
- 3) Spesifikasi masalah (problem specification) tahap pemahaman masalah dimana analis mengembangkan representasi masalah substantif secara formal (logis)
- 4) Pengenalan masalah (problem sensing) tahap perumusan masalah dimana analisis mengalami kekhawatiran yang campur

aduk dan gejala ketegangan dengan cara mengenali situasi masalah.²

b. Peramalan.

Peramalan (forecasting) adalah suatu prosedur untuk membuat informasi yang faktual tentang situasi sosial masa depan atas dasar informasi yang telah ada. Peramalan dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi dimasa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Tentang masalah kebijakan ramalan mempunyai tiga bentuk utama, yaitu:

- 1) Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan,
- 2) Sebuah prediksi adalah ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas. Sifat terpenting dari prediksi adalah menspesifikasikan kekuatan penyebab dan akibat yang diyakini mendasari suatu hubungan
- 3) Suatu perkiraan adalah ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informative atau penilaian pakar tentang situasi masyarakat dimasa depan.³

c. Rekomendasi.

Rekomendasi kebijakan adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai sasarannya. Dalam rekomendasi kebijakan maka

²William N. Dunn, *Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Gajah Mada,1999), h. 226-230

³ William N. Dunn, *Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public....h. 291-292*

yang perlu diperhatikan adalah bagaimana prakondisi untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi, pemimpin harus mengkomunikasikan kepada bidang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan supaya mereka memahami kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2) Sumber daya manusia harus mendukung pelaksanaan kebijakan, jika SDM tidak mendukung maka menghambat pelaksanaan kebijakan.
- 3) Disposisi atau pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan harus ditetapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, serta komitmen melaksanakan kebijakan yang dimaksud.
- 4) Struktur birokrasi, koordinasi menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan.⁴

d. Pemantauan.

Pemantauan atau monitoring menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan (monitoring) merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan public. Pemantauan memiliki empat fungsi dalam analisis kebijakan yaitu:

⁴Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 90-92

- 1) Kepatuhan (compliance) pemantauan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat
- 2) Pemeriksaan (auditing) pemantauan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu telah sampai pada mereka
- 3) Akuntansi (monitoring) menghasilkan sesuatu yang bermanfaat
- 4) Eksplanasi pemantauan juga menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan public dan program berbeda.⁵

e. Evaluasi.

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang dihasilkan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah dapat terselesaikan tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi kebijakan merupakan tahap penting dalam kebijakan public. Ada beberapa fungsi evaluasi diantaranya yaitu:

- 1) Evaluasi memberi informasi yang falit dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

⁵William N. Dunn, *Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public....* h.20

- 2) Evaluasi kebijakan memberi sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.⁶

Dalam proses pembuatan kebijakan/analisis kebijakan maka harus memperhatikan lima komponen yaitu: perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan serta evaluasi. Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lainnya, karena kelima komponen tersebut dapat berguna untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan dalam berbagai konteks pendidikan.

3. Konsep Budgeting/biaya

Biaya adalah keseluruhan pengeluaran baik yang bersifat uang maupun bukan uang, sebagai ungkapan rasa tanggung jawab semua pihak (masyarakat, orang tua, dan pemerintah) terhadap upaya pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Dalam membicarakan pembiayaan pendidikan, ada beberapa konsep penting yang harus dipahami dan diperhatikan yaitu:

- a. *Opportunity cost* atau disebut juga biaya nyata (real cost) dari suatu kegiatan adalah biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu keputusan tentang penggunaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan

⁶ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif....*h. 96-97

dalam menyelesaikan suatu kegiatan, dan bukan untuk tujuan yang lain.

- b. *Monetary expenditure* adalah konsep akuntansi yang berhubungan dengan sejumlah pembayaran dengan mata uang untuk pembelian barang atau jasa untuk suatu kegiatan.
- c. *Current expenditure* adalah bentuk pengeluaran biaya yang dilakukan dengan segera dan berulang-ulang. Misalnya pengeluaran biaya untuk kegiatan belajar mengajar, untuk gaji pegawai, untuk pembelian peralatan pelajaran, dan untuk pembayaran langganan listrik, air, telepon, dan sebagainya.
- d. *Capital expenditure* adalah bentuk pengeluaran biaya yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang dan akan diulangi sesudah beberapa tahun kemudian. Misalnya, untuk pembangunan gedung sekolah, melengkapi perabot sekolah.
- e. *Imputed annual rent* adalah bentuk pengeluaran biaya untuk menyewa fasilitas.
- f. *Private cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing individu orang tua atau anggota masyarakat untuk membiayai anak-anaknya.
- g. *Social cost* adalah pengeluaran biaya yang dilakukan untuk berlangsungnya pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Misalnya, gaji guru.

- h. *Fixed cost* merupakan biaya tetap yang dikeluarkan untuk pengadaan barang-barang modal seperti untuk pembangunan gedung sekolah, pengadaan peralatan sekolah, dan pembayaran sewa fasilitas sekolah.
- i. *Variable cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai operasional sekolah, misalnya untuk pengadaan buku pelajaran, pembayaran gaji pegawai.
- j. *Total cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk keseluruhan sistem pendidikan .
- k. *Average cost* adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk suatu jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- l. *Marginal cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap satuan pendidikan tertentu yang keadaannya sangat bervariasi.
- m. *Current price expenditure* adalah konsep biaya yang berhubungan dengan harga barang dan jasa pada sistem pendidikan yang memiliki tendensi kenaikan atau penurunan harga, termasuk didalamnya masalah kenaikan gaji yang berhubungan dengan kualifikasi dan kesenioritasan pegawai.⁷

Didalam konsep pembiayaan ada beberapa yang perlu di perhatikan oleh sekolah supaya mutu pendidikan dapat lebih menjadi dan dapat mengetahui alokasi pembiayaan yang ada di sekolah tersebut dan mudah dalam mengelola keuangan di lembaga pendidikan tersebut.

4. Jenis Budgeting

⁷Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet I, h.7-13

Kemampuan pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan praktek-praktek penyelenggaraan sekolah, baik yang dikelola secara konvensional maupun berbasis MBS. Pemikiran paling optimis mengenai posisi biaya dikaitkan dengan mutu pendidikan menggariskan bahwa biaya merupakan fungsi mutu. Kata lainnya, hubungan antara penambahan biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pendidikan bersifat linier. Pendapat semacam ini tentu masih harus dibuktikan kebenarannya secara empiris. Bukan tidak mungkin dan memang hampir dipastikan masih banyak faktor dominan lain yang dapat mempengaruhi mutu kinerja sekolah, seperti kompetensi guru, lingkungan belajar, tingkat social ekonomi orang tua, dan lain-lain.

Biaya pendidikan dapat dibedakan menjadi 5 yaitu:

- a. Biaya langsung yaitu segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung yang dimaksud pada hal ini yaitu dimensi pengeluaran pendidikan meliputi biaya rutin dan biaya pembangunan yaitu seperti dana APBN, APBD, BOS.⁸
- b. Biaya tidak langsung yaitu pengeluaran yang dikeluarkan oleh keluarga untuk anaknya sendiri, misalnya biaya untuk hidup siswa, transportasi, jajan dan kesehatan.
- c. Private cost adalah keseluruhan biaya yang di keluarkan oleh orang tuanya untuk kesuksesan anaknya.

⁸E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 48

- d. Social cost adalah biaya untuk keperluan belajar yaitu dari masyarakat.
- e. Materi cost adalah biaya yang dikeluarkan dalam bentuk uang ataupun materi seperti hibah dari perusahaan untuk pendidikan.

Dari beberapa jenis biaya pendidikan diatas dapat disimpulkan bahwa banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan sehingga dengan adanya biaya yang dikeluarkan oleh berbagai macam, seperti dana dari orang tua, perusahaan, dan oleh sekolah itu sendiri demi kesuksesan peserta didik dan meningkatnya sebuah mutu pendidikan yang sesuai dengan visi misi sekolah tersebut.

5. Sumber Budgeting

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.⁹ Dalam dimensi sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam 4 kategori besar, yaitu:

- a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah di semua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah.

⁹Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Rosda Karya, 2003), h. 5-6

Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.

- b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan untuk pendidikan, seperti UNICEF, Unesco, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
- c. Uang sekolah atau iuran lainnya yaitu pembayaran orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
- d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela.

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk

- 1) penempatan guru negeri yang dipekerjakan.
- 2) bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta
- 3) uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini mungkin berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan secara incidental guna menutup sebagian kecil kebutuhan rutin sedang bantuan dapat diberikan berdasarkan jumlah murid, serta subsidi diberikan untuk menutup semua pengeluaran rutin sekolah.¹⁰

¹⁰Harbangan Siagian, *Administrasi Pendidikan*, (Semarang: Satya Wacana, 1989), h. 133

Dari penjelasan diatas bahwa sumber pendidikan ada beberapa sumber yaitu seperti biaya dari pemerintah seperti dana BOS, APBN kemudian biaya dari orang tua dan dari perusahaan-perusahaan, anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekolah dan membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu di lembaga tersebut.

6. Ruang Lingkup Bdgeting

Dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah, manajemen pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Dari berbagai hasil kajian konseptual dapat dideskripsikan menjadi bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berbasis madrasah mencakup tiga kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggung jawaban.

a. Perencanaan

Pada sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu ada perencanaan. Perencanaan pada sebuah lembaga sangat esensial, karena pada kenyataannya, perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lain. Tanpa ada perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan.

Seorang perencana pendidikan dituntut untuk memiliki kemampuan dan wawasan yang luas agar dapat menyusun sebuah

rancangan yang dapat dijadikan pegangan pada pelaksanaan proses pendidikan selanjutnya.¹¹

Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan, yaitu:

- 1) Pertama, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan dan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya yang tidak efektif.
- 2) Kedua, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
- 3) Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan, oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah.
- 4) Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.¹²

Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah sedikitnya mencakup dua kegiatan yakni penyusunan anggaran dan pengembangan

¹¹Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun, *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 46

¹²Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta, 2003), edisi 2, h. 167

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM). Kedua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Penyusunan anggaran pembiayaan berbasis madrasah atau sering disebut Anggaran Belanja Madrasah (ABM)

Anggaran (budget) merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu.¹³ Penyusunan anggaran merupakan visualisasi atau gambaran terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang dapat diketahui pula penentuan satuan biaya untuk tiap-tiap kegiatannya.

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian juga merupakan alat bantu bagi manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatan-kegiatannya. Selain itu pula anggaran mempunyai manfaat atau berfungsi yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

- (1) Sebagai alat penafsir yaitu untuk memperkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat dilihat kebutuhan dana yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan pendidikan di lembaga.
- (2) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana, sehingga melalui anggaran dapat diketahui besarnya uang atau dana yang

¹³ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 47

boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.

- (3) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya realisasi sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau bahkan adanya penghematan anggaran.

Hal yang paling penting pada penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Madrasah (RAPBS/M) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien dan efisien serta mengalokasikan dana secara tepat sesuai kebutuhan. Melalui RAPBS/M ini dapat diketahui satuan biaya pendidikan.¹⁴

b) Pengembangan Rencana Anggaran Belanja Madrasah (RAPBM)

Proses pengembangan RAPBM pada umumnya menempuh langkah-langkah pendekatan dengan prosedur sebagai berikut:

- (1) Pada tingkat kelompok kerja yang dibentuk madrasah yang terdiri dari para pembantu kepala madrasah memiliki tugas antara lain melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan biaya yang harus dikeluarkan selanjutnya diklasifikasikan dan dilakukan perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil analisis kebutuhan biaya yang dilakukan seleksi alokasi yang diperkirakan sangat mendesak dan tidak bisa

¹⁴Satuan biaya pendidikan atau biaya satuan (*unit cost*) merupakan rata-rata biaya per siswa per satu tahun dalam satu tahun ajaran di lembaga pendidikan. Lihat Dedi Supriadi, Op. Cit., hal. 4

dikurangi, sedangkan yang dipandang tidak mengganggu kelancaran kegiatan pendidikan khususnya proses pembelajaran maka dapat dilakukan pengurangan biaya sesuai dengan dana yang tersedia.

- (2) Pada tingkat kerjasama dengan komite madrasah dengan kelompok kerja yang telah terbentuk perlu dilakukan untuk mengadakan rapat pengurus dan rapat anggota dalam mengembangkan kegiatan yang harus dilakukan sehubungan dengan pengembangan RAPBM.
- (3) Sosialisasi dan legalitas Setelah RAPBM dibicarakan dengan komite madrasah selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. Pada tahap sosialisasi selanjutnya disosialisasikan kepada berbagai pihak. pada tahap sosialisasi dan legalitas ini kelompok kerja melakukan konsultasi dan laporan pada pihak pengawas, serta mengajukan usulan RAPBM kepada Kanwil Departemen Agama untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan.¹⁵

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan berbasis madrasah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yakni penerimaan dan pengeluaran atau penggunaan.

¹⁵Departemen Agama, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*, (Bandung: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Sekolah, 2003), h.116-119

- 1) Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketepatan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Secara konsep banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan, namun secara peraturan termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ada beberapa karakteristik yang identik.
- 2) Pengeluaran sekolah berhubungan dengan pembayaran keuangan sekolah untuk pembelian sumber atau input dari proses sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas. Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat. Dalam manajemen keuangan sekolah, pengeluaran keuangan harus dibukukan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh peraturan. Beberapa hal yang harus dijadikan patokan bendahara dalam pertanggungjawaban pembukuan, meliputi format buku kas harian, buku tabelaris, dan format laporan daya serap penggunaan anggaran serta beban pajak. Aliran pengeluaran keuangan harus dicatat sesuai dengan waktu serta peruntukannya.

c. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

1) Evaluasi

Langkah terakhir adalah evaluasi bagaimana anggaran dapat melayani dengan baik untuk meningkatkan efektifitas sekolah. Evaluasi sering menunjukkan kemungkinan adanya perbedaan di dalam: tujuan, prioritas, dan kemungkinan berbagai sumber daya yang tersedia.¹⁶ Pengawasan keuangan sekolah harus dilakukan melalui aliran masuk dan keluar uang yang dibutuhkan oleh bendahara. Hal itu dilakukan mulai dari proses keputusan pengeluaran pos anggaran, pembelanjaan, perhitungan dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administrasi pembukuan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap pengeluaran dan pemasukan setiap bulan ditangani sebagai berita acara. Kepala sekolah sebagai atasan langsung bertanggung jawab penuh atas pengendalian, sedangkan pengawasan dari pihak berwenang, melalui pemeriksaan yang dilaksanakan oleh instansi vertical, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.

Pengawasan tersebut relatif dilihat dari tugas rutinitas atas dasar kewenangan pengawasan pembiayaan yang masuk dan diserap di sekolah.

Prosedur pengendalian penggunaan alokasi anggaran sifatnya sangat normatif administratif artinya pemenuhan pengendalian masih terbatas pada angka kuantitatif yang terdokumentasi. Dengan demikian aspek-aspek realistis penggunaan sulit diukur secara obyektif. Persoalan tersebut sering terjadi di setiap sekolah. Hal tersebut disebabkan belum berjalannya fungsi

¹⁶Wahyosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 321

administrasi keuangan dimana aliran uang dan barang teridentifikasi sesuai dengan peran dan fungsi.

2) Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan keuangan sekolah di laksanakan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada:

- a) Kepala Dinas Pendidikan
- b) Kepala Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD)
- c) Kantor Dinas pendidikan .

Pertanggungjawaban yang dikenal dengan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), dilaporkan setiap bulan kepada pihak yang ditetapkan sesuai dengan format dan ketepatan waktu. Khusus untuk keuangan komite sekolah, bentuk pertanggungjawaban sangat terbatas pada tingkat pengurus dan tidak secara langsung kepada orang tua peserta didik.¹⁷

Selain dana komite ada beberapa hal yang perlu di pertanggungjawabkan seperti dana APBN, APBD, dan BOS. Pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Dipertegas lagi oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN Tahun 2003) pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari

¹⁷E Mulyasa, op. cit., h. 205-206

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)"¹⁸Pembiayaan pendidikan dengan asumsi bahwa pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan negara. Juga asumsi yang lain ialah bahwa kegiatan-kegiatan pendidikan itu adalah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Analisis kebijakan pembiayaan ini meliputi mekanisme penentuan anggaran pendidikan serta keberadaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) atau biasa dikenal dengan istilah MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). Peran atau kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan terlihat dengan adanya program BOS/M (Bantuan Operasional Sekolah/Madrasah), sebagaimana terjelaskan dalam buku Panduan BOS, Pengelolaan Keuangan serta Monitoring dan Evaluasi. Buku tersebut menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, Petunjuk Teknis Keuangan Bantuan Operasional Sekolah, serta Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi.

Jadi dalam kegiatan manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggung jawaban, di dalam hal tersebut yang perlu di perhatikan atau yang perlu jelas pembukuannya seperti APBN, APBD, dan dana BOS dari berbagai jenis dana tersebut dapat dikelola dengan baik supaya program yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dapat berjalan dengan baik.

¹⁸Undang-Undang SISDIKNAS, (Jakarta: Redaksi Siinar Grafika, 2003), h. .24

B. Mutu Pendidikan

1. Pengertian Mutu Pendidikan

Mutu dalam pengertian relatif bukanlah suatu sebutan untuk suatu produk atau jasa, tetapi pernyataan bahwa suatu produk atau jasa telah memenuhi persyaratan atau kriteria, atau spesifikasi yang ditetapkan. Produk atau jasa tersebut tidak harus terbaik, tetapi telah memenuhi standar yang ditetapkan. Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek. Pertama mutu diukur dan dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang telah ditetapkan lebih dulu. Kedua, konsep ini mengakomodasi keinginan konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar produk dan atau jasa yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan, dan perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan konsumen/pelanggan, bukan semata-mata kehendak produsen.¹⁹

Definisi tentang mutu sangat beragam dengan sudut pandang yang berbeda namun memiliki hakekat yang sama. Dalam membahas definisi mutu kita perlu mengetahui definisi mutu produk yang disampaikan oleh lima pakar Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management). Berikut ini definisi-definisi tersebut :

- a. Juran menyebutkan bahwa mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

¹⁹Umaid, *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*, (Ciputat: Pusat Kajian Manajemen mutu pendidikan. 2004), Cet I, h. 162-163

- b. Crosby mendefinisikan mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.
- c. Deming mendefinisikan mutu, bahwa mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
- d. Feigenbaum mendefinisikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya.
- e. Garvin dan Davis menyebutkan bahwa mutu adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen.

Mutu adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang akan atau yang tersirat. Lebih luas lagi Mutu adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan hubungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.²⁰

Dari beberapa definisi mutu di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Mutu meliputi usaha memenuhi kebutuhan atau melebihi kebutuhan atau harapan pelanggan, Mutu mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan mutu saat ini, mungkin dianggap kurang bermutu pada masa mendatang).

²⁰Abu Choir, *Manajemen Mutu Terpadu.Modul Mata Kuliah Jurusan Kependidikan Islam*,(Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo Semarang), h.1

Sedangkan mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang PAKEMB (Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna). Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non akademik siswa tinggi. Outcome dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap di dunia kerja, gaji wajar, semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas.

2. Konsep peningkatan mutu pendidikan

a. Peningkatan mutu pendidikan

Pada era otonomi daerah, berbagai tantangan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan mengharuskan adanya reorientasi dan perbaikan sistem manajemen penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, pelaksanaan konsepsi school based management dan community based education merupakan suatu keharusan. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan konsep manajemen sekolah yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab yang luas bagi sekolah berdasarkan profesionalisme untuk menata organisasi sekolah, mencari, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya pendidikan yang tersedia, serta memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan.²¹

²¹ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h .51

Dalam MBS sekolah dapat merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan sendiri kebijakan, program, dan kegiatan sekolah, sepanjang untuk memajukan institusi sekolah dan meningkatkan mutu pendidikannya. Oleh karena itu, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ini kemudian dikenal dengan nama Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Sudah barang tentu sekolah tidak dapat melakukannya sendiri. Sekolah harus dapat menjalin dan bekerja sama dengan semua stakeholder pendidikan.²²

b. Prinsip-prinsip peningkatan mutu pendidikan

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan diantaranya sebagai berikut.

- 1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan professional dalam bidang pendidikan.
- 2) Menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- 3) Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan, norma dan kepercayaan lama harus diubah.
- 4) Kunci utama peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan.
- 5) Profesional di bidang pendidikan harus berani melakukan perubahan dan tahu bagaimana mengatasi tuntutan-tuntutan baru.

²² Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008),h .30

- 6) Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan.
- 7) Sistem pengukuran. Dengan pengukuran dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
- 8) Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.²³

Peningkatan mutu hanya akan berhasil jikalau ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas sekolah. Proses pendidikan menyangkut berbagai hal diluar proses pembelajaran, seperti misalnya lingkungan sekolah yang aman dan tertib, misi dan target mutu yang ingin dicapai setiap tahunnya, kepemimpinan yang kuat, harapan yang tinggi dari warga sekolah untuk berprestasi, pengembangan diri, evaluasi yang terus menerus, komunikasi dan dukungan intensif dari pihak orang tua, masyarakat maupun komite sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat.

²³Nana Syaodih Sukmadinata dkk, *Pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), Cet II, h. 10-11

3. Faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan

Mutu tidak terjadi begitu saja, ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi, dan harus didekati secara sistematis dengan menggunakan proses perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan salah satu bagian penting dari Total Quality Management (TQM). Tanpa arahan jangka panjang yang jelas, sebuah institusi tidak dapat merencanakan peningkatan mutu. Bahwa sebuah visi strategis yang kuat merupakan salah satu faktor kesuksesan yang penting bagi institusi manapun.²⁴

Edward Sallis mengatakan bahwa TQM adalah sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang.²⁵

Dalam pembahasan di atas bahwasanya mutu pendidikan sebuah pandangan kedepan bagaimana yang akan dilakukan proses perbaikan untuk menjadikan sekolah itu dapat berkualitas yaitu dengan cara melakukan perencanaan matang, pelaksanaan yang baik, organisasi yang harmonis, evaluasi yang dilakukan secara terus menerus agar nantinya dapat mewujudkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan sekolah.

Maka usaha-usaha untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui beberapa cara, seperti :

²⁴ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan Page, 1993), h. 211

²⁵Edward Sallis, *Total Quality Management...* h. 34

- a. Meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat, sertifikasi kompetensi dan profil portofolio.
- b. Membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif.
- c. Menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur.
- d. Meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik.
- e. Membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membuat daftar riwayat hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian Pekerjaan.

TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Namun pendekatan TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yaitu:

- 1) fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal,
- 2) memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas

- 3) menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
- 4) memiliki komitmen jangka panjang
- 5) membutuhkan kerja sama tim (teamwork)
- 6) memperbaiki proses secara berkesinambungan
- 7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- 8) memberikan kebebasan yang terkendali
- 9) memiliki kesatuan tujuan
- 10) adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan.²⁶

Adapun kesimpulan dari karakteristik di atas bahwa yang mencakup karakteristik yang telah disebutkan semua perlu diperhatikan karena sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan anggaran di sekolah membutuhkan kerjasama yang baik semua stakeholder di sekolah, jika hal tersebut salah satunya tidak dapat dipenuhi oleh sekolah itu maka sebuah program tidak akan berjalan dengan baik dan efektif.

²⁶Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta, 2003), h. 4-5

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Bentuk penelitian dalam skripsi adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian dengan mengumpulkan data di lapangan dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut.”¹

Pembahasan dalam skripsi menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu: “Metode yang meneliti suatu kondisi, pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan membuat gambaran deskriptif atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.”²

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MAN 5 Aceh Besar. Alasan penulis ingin meneliti di sekolah tersebut karna dapat terjangkau dan guru-guru yang ada di MAN 5 Aceh Besar tersebut ramah-ramah.

Adapun mengenai waktu penulis meneliti kelapangan berdasarkan surat penelitian yang dikeluarkan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

C. Subjek Penelitian

Adapun Subjek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara yang ada di MAN 5 Aceh Besar.

Alasan peneliti akan menjadikan kepala sekolah dan bendahara sebagai objek karena kepala sekolah dan bendahara berpengaruh penting

¹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1993),h.106

² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian, Cet 1*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h.65

terhadap data-data yang akan saya ambil dari sekolah tersebut dan juga objek penelitian yang saya sebutkan sangat berperan dalam penelitian ini, untuk menghasilkan sekolah yang bermutu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan jenis kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dilakukan dalam pengumpulan data-data untuk landasan teoritis dengan cara menelaah buku-buku yang berhubungan dengan kebijakan kepala sekolah, manajemen mutu pendidikan.

Sedangkan penelitian lapangan akan dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan yang telah ditentukan yaitu MAN 5 Aceh Besar. Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain adalah dengan cara:

1. Observasi

Teknik yang di gunakan adalah observasi langsung, seperti yang di ungkapkan Sutrisno Hadi dalam buku Metodologi penelitian bahwa: Observasi artinya pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.³ Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian yaitu di MAN 5 Aceh Besar, untuk memperoleh data yang akurat. Oleh karena itu, tujuan observasi ini adalah untuk melihat keadaan yang sesungguhnya yang ada di lokasi penelitian.

³Rusdin Pohan. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Banda Aceh: Ar-Rijal Institut, 2008), h. 71.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan dua orang atau lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan mereka masing-masing.⁴

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam implementasinya peneliti akan menyusun pedoman wawancara guna untuk mendapatkan data yang akurat. Wawancara peneliti dilakukan dengan kepala sekolah dan bendahara di MAN 5 Aceh Besar. Selain menggunakan metode Observasi dan metode wawancara peneliti juga menggunakan metode dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa gambaran umum lokasi penelitian baik yang berhubungan dengan batas-batas wilayah geografis, keadaan sekolah, dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan dalam penelitian ini.

Metode dokumentasi, yakni penelitian yang berusaha mendapatkan data melalui beberapa arsip dan dokumen, surat kabar, jurnal, buku dan benda-benda tulis yang relevan.⁵ Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian dan dokumen-

⁴Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 179

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.200

dokumen yang relevan dengan obyek penelitian untuk memperkuat metode observasi dan wawancara yang dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun dilapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.⁶

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Adapun aktifitas dalam analisis data adalah sbb.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 222

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan keluasaan dan kedalaman wawasan. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan,

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah langkah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷

F. Uji Keabsahan Data

Setelah data yang penulis perlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data. Menganalisis merupakan suatu cara yang digunakan untuk menguraikan data yang diperoleh agar dapat dipahami bukan hanya orang peneliti saja tetapi juga dapat dipahami oleh orang lain.

Adapun menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Untuk mencapai kredibilitas data penelitian, antara lain dengan melakukan triangulasi. Triangulasi dalam kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai

⁷Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D...*,h. 247-253.

waktu, dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi tehnik pengumpulan data, dan waktu.

Selain triangulasi, upaya untuk memperoleh data yang kredibel juga dilakukan dengan cara mencatat dan merekam secara rinci berbagai temuan dan informasi yang diperoleh di lapangan. Kredibilitas adalah pengujian data untuk menilai kebenaran dan keabsahan peneliti dengan analisis kualitatif.

2. Transferabilitas

Transferabilitas kemampuan hasil kualitatif untuk diberlakukan pada keadaan yang sama dan dalam kehidupan yang nyata transferabilitas diartikan sebagai proses menghubungkan temuan yang ada dengan praktik kehidupan dan perilaku nyata dalam konteks yang lebih luas. Transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat ditetapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian dan ada kemungkinan menerapkannya, maka penelitian harus membuat laporan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Dependabilitas

Salah satu hal penting yang harus dipegang oleh peneliti kualitatif adalah menjaga dependabilitas temuan, informasi yang diperoleh merupakan informasi yang saling tergantung sama lain untuk menjalin makna yang lebih akurat, sehingga orang dapat melakukan replikasi, upaya menjaga dependabilitas ini dapat dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Konfirmabilitas

Menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas, oleh karena itu dua pengujian ini sering dilakukan bersama-sama.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MAN 5 Aceh Besar pada tanggal 11 s.d 13 januari 2018, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

MAN 5 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama Aceh Besar. MAN 5 berlokasi di kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar, Darul Imarah merupakan salah satu kecamatan dalam wilayah kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, yang terbagi pada beberapa pemukiman dan desa. Adapun jarak MAN 5 Kabupaten Aceh Besar lebih kurang 150 meter dari kantor camat Darul Imarah, transportasi menuju ke sekolah relatif mudah, dikarenakan mereka bisa berjalan kaki, memakai kendaraan roda dua dan angkutan umum.¹

1. Identitas Sekolah

- a. Nama Sekolah : MAN 5 Aceh Besar
- b. NPSN : 10114243
- c. NSM : 1311111060006
- d. Tahun Berdiri : 1998
- e. Status : Negeri/ 22 maret 1999
- f. Alamat Sekolah : jl.Banda Aceh Pekan Biluy No.7 Aceh Besar
- g. Jalan/Dusun : Lampeneurut peukan biru
- h. Desa : Legeu

¹Dokumentasi Sekolah MAN 5 Aceh Besar Tahun Ajaran 2018-2019

- i. Kecamatan : darul Imarah
- j. Kabupaten : Aceh Besar
- k. Propinsi : Aceh
- l. Kode Pos : 23352
- m. Telepon : (0265) 7640366

2. Keadaan Fisik Sekolah

- a. Luas Tanah : 3.172 M³
- b. Jumlah Ruang Kelas : 10 Ruang

3. Visi, Misi dan Tujuan MAN 5 Aceh Besar

a. Visi Sekolah

“Visi MAN 5 Aceh Besar adalah Terwujudnya Madrasah Aliyah yang amanah, akuntabel, serta melahirkan insan kamil yang berakhlakul karimah dengan mengoptimalkan kinerja.”

b. Misi Sekolah

Adapun Misi MAN 5 Aceh Besar adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan
- 3) Meningkatkan hubungan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan (*stake holder*).
- 4) Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

- 5) Meningkatkan pengelolaan administrasi secara cepat, tepat dan akuntable.

c. Tujuan Sekolah

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program kerja tahun sebelumnya kita dapat melihat hasil-hasil yang telah dicapai serta permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi. Adapun tujuan-tujuan dari sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya pengembangan kurikulum secara bertahap yang adaptif dan proaktif.
- 2) Meningkatkan Kecerdasan, Pengetahuan, Kepribadian, serta Keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 3) Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat Peserta Didik melalui layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler;
- 4) Terlaksananya peningkatan pembinaan nilai-nilai moral dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Meningkatkan kedisiplinan untuk semua komponen warga madrasah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan dengan berbagai kegiatan positif yang sesuai dengan tugasnya.
- 7) Terciptanya jalinan kerjasama yang harmonis antara sesama warga madrasah, orang tua peserta didik, masyarakat, dan semua

stakeholders madrasah lainnya.

8) Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang kondusif dan memadai.

9) Terlaksananya tugas pokok dan fungsi masing-masing komponen madrasah.

10) Terwujudnya SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang tinggi.

4. Keadaan lingkungan yang mengelilingi sekolah

Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah diantaranya:

- a. Sebelah Utara : Dengan Jalan Lampenerut Pekan Biluy
- b. Sebelah Selatan : Dengan Tanah Kamaruddin Lampeuneuen
- c. Sebelah Timur : Dengan Tanah Tgk. Yusuf Lamsidaya(Alm)
- d. Sebelah Barat : Dengan Tanah K.Abdurrazyid Kuta Karang

5. Program kepala sekolah

Adapun program kepala sekolah pertahunnya :

a. Program kerja kepala sekolah

1) Kegiatan harian kepala sekolah

- a) Memeriksa daftar hadir guru, tenaga teknis kependidikan dan tenaga tata usaha
- b) Mengatur dan mengawasi guru piket
- c) Memeriksa program satuan pelajaran guru dan persiapan lainnya yang menunjang proses belajar mengajar

- d) menyelesaikan surat-surat, dupak, sertifikasi, angka kredit guru, menerima tamu, dan menyelenggarakan pekerjaan kantor lainnya
- e) Mengatasi hambatan-hambatan terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar
- f) Menyelesaikan laporan-laporan dari setiap urusan :
Kepala tata usaha dan urusan terkait
Wakil Kepala Sekolah dan Guru terkait
- g) Memeriksa segala sesuatu menjelang sekolah usai
- h) Melaksanakan supervisi kegiatan belajar mengajar (KBM)

2) Program Kerja Harian per Minggu, Tabel 4.1

NO	Waktu	Kegiatan	Tujuan/sasaran
1.	Setiap hari senin minggu I dan III sesudah upacara	a. Pembinaan Guru dan TU tentang Pentingnya kelancaran KBM. b. Mengadakan evaluasi mingguan yang lalu dan merencanakan mingguan yang akan datang.	Guru, karyawan TU agar menyadari betul pentingnya ketertiban.

2.	Setiap akhir bulan	a. Monitoring Memeriksa Buku harian kemajuan kelas, kegiatan atau piket, presensi guru, dan tata usaha b. Rapat koordinasi Wakasek untuk meminta laporan dan pendapat/ saran dari wakasek tersebut	Hasil kegiatan guru dan tata usaha. Wakasek terwujudnya seluruh kegiatan
----	--------------------	--	--

3) Program Kerja Harian Menurut Waktu, 4.2

No	Waktu	Kegiatan	Tujuan/sasaran
1.	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu Pukul:07.00-07.30	a. Pengawas berdiri didepan pintu gerbang untuk mengawasi Guru,Tata Usaha,dan Siswa tentang kemungkinan ada yang terlambat	Guru, KaryawanTU dan siswa
2.	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu	b. Pengamatan Mengamati tugas guru piket, mengamati	Siswa/ Ketertiban

	Pukul:07.00-07.30	lingkungan sekolah, kemungkinan ada yang diluar sekolah/kelas.	
3.	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu Pukul:08.00-15.30	c. Pengerjaan Mengerjakan tugas administrasi Kep.Sek Melaksanakan kegiatan monitoring presensi Guru Tata usaha, KBM	Kepala Sekolah,Guru, wakasek,tujuanya untuk kelancaran KBM dan kedisiplinan
4.	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, dan Sabtu Pukul:13.00-15.30	d. Laporan Guru Piket Koord. Urusan Tata Usaha Monitoring Presensi Guru dan tata usaha	Guru Piket, TU,Ketertiban

4) Program kerja bulanan kepala sekolah

Kegiatan Bulanan Kepala Sekolah meliputi :

- a) Melaksanakan penyelesaian kegiatan yang berhubungan dengan gaji, setoran iuran Dewan sekolah, laporan bulanan dan belanja sekolah
- b) Memeriksa daftar hadir guru, tata usaha, dan siswa
- c) Mengadakan pemeriksaan buku Kas

- d) membuat pertanggungjawaban keuangan
- e) Melaksanakan pemeriksaan:
 - (1) Buku Kas
 - (2) Kumpulan bahan evaluasi berikut analisa
 - (3) Kumpulan program satuan pelajaran
 - (4) Diagram pencapaian siswa
 - (5) Diagram daya serap siswa
 - (6) Program perbaikan dan pengayaan
 - (7) Buku Catatan pelaksanaan BK
- f) Memberi petunjuk/catatan kepada guru tentang siswa yang perlu mendapat perhatian
- g) Menyelesaikan masalah/kasus surat menyurat dll yang perlu selesai
- h) Memberi peringatan bagi guru, tata usaha yang kurang menunjukkan kesetiaan
- i) Mengadakan rapat koordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah untuk mengadakan evaluasi keadaan sekolah dalam satu bulan dan merencanakan bulan berikutnya
- j) Tugas Kepala Sekolah dibantu :
 - (1) Kepala Sekolah
 - (2) Pegawai Terkait
 - (3) Wakil Kepala Sekolah

(4) Wali kelas

(5) Guru BK

5) Program kerja semesteran kepala sekolah

Kegiatan semesteran kepala sekolah

- a) Menyelenggarakan perbaikan alat-alat sekolah (alat kantor), alat praktikum sekolah, dan sebagainya
- b) Menyelenggarakan pengisian daftar Induk siswa/ buku Induk siswa
- c) Menyelenggarakan persiapan evaluasi semester
- d) Menyelenggarakan evaluasi BP/BK, OSIS, UKS dan ekstrakurikuler
- e) Menyelenggarakan semesteran termasuk kegiatan :
 - (1) Kumpulan Nilai
 - (2) Ketetapan Nilai Raport
 - (3) catatan siswa yang perlu mendapat perhatian
 - (4) Pengisian raport
 - (5) Pemberitahuan dan pemanggilan orang tua sejauh diperlukan untuk konsultasi

6) Program kerja akhir tahun kepala sekolah

Kegiatan akhir kepala sekolah:

- a) Menyelenggarakan penutupan buku inventaris dan keuangan sekolah
- b) Menyelenggarakan ujian sekolah/ ujian nasional

- c) Menyelenggarakan persiapan kenaikan kelas yang meliputi:
 - (1) Persiapan daftar kumpulan nilai (legger)
 - (2) Persiapan bahan-bahan untuk rapat guru
 - (3) Pengisian raport dan ijazah
 - (4) Upacara akhir tahun pelajaran, kenaikan kelas, pembagian raport, penyerahan ijazah
 - (5) Pelepasan lulusan
- d) Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran yang bersangkutan
- e) Menyelenggarakan penyusunan rencana keuangan tahun yang akan datang (RKAS)
- f) Menyelenggarakan penyusunan pendidikan (perbaikan pendidika) dan pemeliharaan sekolah dan alat bantu pendidikan.
- g) Menyelenggarakan pembuatan laporan pendidikan
- h) Melaksanakan penerimaan siswa baru yang meliputi:
 - (1) Penyiapan formulir dan pengumuman PPDB
 - (2) Pembentukan panitia penerimaan siswa baru
 - (3) Penyusunan syarat penerimaan dan pendaftaran.²

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sekolah adalah salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang proses pendidikan, tanpa adanya sarana dan prasarana maka

²Dokumentasi Pengarsipan di MAN 5 Aceh Besar. 2018

akan sulit untuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar, adapun sarana dan prasarana yang terdapat di MAN 5 Aceh Besar adalah sebagai berikut.

MAN 5 Aceh Besar memiliki gedung tersendiri dengan konstruksi bangunan permanen dan juga memiliki fasilitas yang cukup memadai, terutama ruang belajar, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang pengajaran, ruang tata usaha, perpustakaan, mushalla, ruang laboratorium, ruang komputer, ruang pertemuan, wc guru dan siswa dan lainnya akan tetapi kenyamanan dalam belajar sangat mengkhawatirkan dikarenakan parkir siswa siswi beserta guru masih di depan ruangan kelas jadi keefektifan dalam belajar masih sangat memprihatinkan. semua sarana dan prasarana ini dibangun di atas tanah lebih kurang 3. 172 M³.³

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Nama Sarana dan Prasarana MAN 5 Aceh Besar

No	Jenis Bangunan	Jumlah Ruang Menurut Kondisi (Unit)		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Ruang Kelas	11	0	0
2.	Ruang Kepala Sekolah	1	0	0
3.	Ruang Guru	1	0	0

³Dokumentasi MAN 5 Aceh Besar Tahun Ajaran 2018-2019

4.	Ruang Tata Usaha	1	0	0
5.	Laboratorium IPA	1	0	0
6.	Laboratorium Komputer	1	0	0
7.	Laboratorium Bahasa	1	0	0
8.	Ruang Perpustakaan	1	0	0
9.	Ruang Usaha Kesehatan Sekolah	1	0	0
10.	Ruang Keterampilan	1	0	0
11.	Ruang Kesenian	1	0	0
12.	Toilet Guru	2	0	0
13.	Toilet Siswa	2	0	0
14.	Ruang Bimbingan Konseling (BK)	1	0	0
15.	Gedung Serba Guna (Aula)	1	0	0
16.	Ruang OSIS	1	0	0
17.	Ruang Pramuka	0	0	0
18.	Masjid/Musholla	1	0	0

19.	Gedung/Ruang Olahraga	0	0	0
20.	Rumah Dinas Guru	1	0	0
21.	Ruang Sejarah	1	0	0
22.	Ruang Multi Media/Ruang IPS	0	0	0
23.	Pos Satpam	0	0	0
24.	Kantin	2	0	0

Sumber: *Dokumentasi Tata Usaha MAN 5 Aceh Besar Tahun 2018-2019*

7. Keadaan guru dan karyawan

MAN 5 Darul Imarah Aceh Besar sampai dengan saat ini memiliki sebanyak 26 orang guru. Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan guru di sekolah ini dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini.

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Madrasah	1
2	Kepala Tata Usaha	1
3.	Guru	23
4.	Staf Tata Usaha	1
5.	Penjaga dan Pesuruh	-
Jumlah Total Pegawai		26

8. Keadaan siswa

Jumlah Siswa pada Tahun 2017 terdiri dari: tabel 4.5

No	Kelas	L	P	Jumlah
1.	X	23	22	45
2.	XI	25	33	58
3.	XII	25	33	58
JUMLAH		73	88	161

B. Hasil Penelitian

Dalam kedudukan sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan program pendidikan di sekolah, terutama dalam mengkoordinasi, menggerakkan, dan mengharmoniskan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi yang sangat berpengaruh dalam menentukan kemajuan sekolah. kepala sekolah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam menunjang suksesnya suatu lembaga sekolah, dengan menunjukkan kinerja yang baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat sekolah baik guru, siswa dan semua pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah melewati proses perencanaan secara teratur dan terarah guna untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting di MAN 5 Aceh Besar, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah adalah, bagaimana kebijakan yang ibuk lakukan terhadap pengelolaan budgeting di sekolah ini? Jawaban dari kepala sekolah bahwa:

Dalam pengelolaan budgeting ibuk selaku kepala sekolah mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap pengelolaan budget di sekolah ini, sebelum dana masuk maka ibuk mengumpulkan semua stakeholder yang ada di sekolah untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu, dimana merencanakan semua untuk saat ini apa yang perlu dipersiapkan dan apa-apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, dengan adanya perencanaan atau rancangan maka teruslah dilaksanakan membuat program-program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, pelaksanaan ini tidak cukup hanya dilakukan beberapa orang akan tetapi harus membentuk sebuah kelompok untuk menyelesaikan sebuah program di sekolah, adapun program yang dilakukan sudah terlaksana maka ibuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan di sekolah dan melihat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Adapun dana yang masuk seperti dana BOS, APBN, APBD maka dari itu dana ini sangatlah membutuhkan pembukuan yang sesuai pengalokasian dananya untuk menghindari sebuah permasalahan dan penyalahgunaan dana yang masuk ke sekolah.⁴

Pertanyaan selanjutnya yaitu menurut ibuk apa saja persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan budget di sekolah ini ? Jawaban dari kepala sekolah bahwa:

Sebelum melakukan pelaksanaan pengelolaan budget terlebih dahulu ibuk dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini melakukan perancangan tentang kegiatan yang paling utama untuk dilaksanakan agar sekolah mencapai tujuan yang telah ditargetkan.⁵

Pertanyaan selanjutnya adalah. Pernahkah ibuk mengevaluasi terhadap pengelolaan budget di sekolah ? Jawaban dari kepala sekolah bahwa:

⁴ Wawancara dengan kepala MAN 5 Aceh Besar. Kamis, 11 januari 2018

⁵ Wawancara dengan kepala MAN 5 Aceh Besar. Kamis, 11 januari 2018

Pernah, ibuk sebagai kepala sekolah setiap hari dan setiap 3 bulan sekali ibuk melakukan evaluasi dan menanyakan kepada semua pembina bagaimana perkembangan dana-dana yang di alokasikan apakah sudah terpakai sesuai dengan kegiatan masing-masing seperti pramuka, PMR, rohis, ekstra kurikuler dan lain-lain.⁶

Pertanyaan selanjutnya di ajukan kepada kepala sekolah pertanyaannya adalah, apa saja program yang ibuk lakukan sehingga mutu pendidikan dapat meningkat? Jawaban dari kepala sekolah bahwa:

Ada beberapa program yaitu seperti: melakukan tes siswa baru, pembangunan pagar, rehab ruangan, rehab lapangan voly, pembangunan lapangan futsal, rehab mushola, pelatihan guru dan pegawai, pengadaan barang inventaris, mobile buku perpustakaan, ATK, alat lab, alat olahraga, kesenian, dan alat kesehatan. Dari semua program yang disebutkan dapat peneliti lihat untuk saat ini sudah berjalan dengan baik walaupun belum sesuai yang diinginkan.⁷

Pertanyaan selanjutnya yang di ajukan kepada kepala sekolah pertanyaannya adalah, bagaimana tingkat keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini? jawaban dari kepala sekolah bahwa:

Tingkat keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini sudah dapat dikategorikan meningkat karena dari hari ke hari penghargaan banyak yang di dapatkan oleh siswa/i yaitu ikut dalam lomba cabang

⁶Wawancara dengan kepala MAN 5 Aceh Besar. Kamis, 11 januari 2018

⁷Wawancara dengan kepala MAN 5 Aceh Besar. Kamis, 11 januari 2018

olahraga yang dapat mengharumkan nama baik sekolah, karena siswa/i yang ada disekolah ini lebih menyukai kegiatan ekstrakurikuler.⁸

Kemudian selanjutnya peneliti bertanya kepada bendahara sekolah yang pertanyaannya adalah, bagaimana perencanaan yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan? Jawaban dari bendahara bahwa:

Kepala MAN 5 Aceh Besar melakukan sebuah rancangan RKA untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ini, adapun kegiatan yang dilakukan seperti, melakukan pelatihan kepada guru yang ada disekolah, melengkapi fasilitas sekolah, dan memenuhi kebutuhan belajar siswa.⁹

Pertanyaan selanjutnya kepada bendahara yaitu menurut ibu apakah kepala sekolah telah melaksanakan kebijakan sesuai yang diharapkan? Jawaban dari bendahara bahwa:

Sudah. Karena sejauh ini program yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan lancar, seperti salah satu program ekstrakurikuler, dan program-program lainnya yang dapat meningkatkan minat siswa dalam bidang ekstrakurikuler, dari segi akademik anak-anak yang ada di sekolah ini kurang aktif dalam belajar akan tetapi lebih menonjol ke bidang olahraganya.¹⁰

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada bendahara yang pertanyaannya adalah menurut ibu apakah pelaksanaan pengelolaan budget di sekolah ini sudah sesuai dengan prosedurnya? Jawaban dari bendahara bahwa:

Sudah, karena telah dilihat bukti-bukti dalam penggunaan budget yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah ini dan pengalokasiannya sudah

⁸Wawancara dengan kepala MAN 5 Aceh Besar. Kamis 11 januari 2018

⁹Wawancara dengan bendahara MAN 5 Aceh Besar. Kamis, 11 januari 2018

¹⁰Wawancara dengan bendahara MAN 5 Aceh Besar. Kamis, 11 januari 2018

jelas akan tetapi dana yang masuk masih belum mencukupi dalam melakukan sebuah program yang telah direncanakan.¹¹

Pertanyaan selanjutnya yang diajukan kepada bendahara yang pertanyaannya adalah bagaimana penyusunan RKA di sekolah ini apa di buat persemester? Jawaban dari bendahara bahwa:

RKA yang di buat di sekolah ini dalam jangka waktu pertahun sekali yaitu dibuat di akhir tahun ajaran, karena di akhir tahun penutupan dan penyerahan buku.¹²

Dari pertanyaan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan terhadap pengelolaan budgeting di MAN 5 Aceh Besar sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik karena perencanaannya sudah sesuai yang di harapkan, dan juga pelaksanaannya sudah efektif dan efisien.

Dari pernyataan di atas juga didukung oleh hasil observasi yang peneliti lakukan yaitu terlihat begitu harmonisnya hubungan kepala sekolah dengan karyawan-karyawan di sekolah, hubungan kekeluargaannya terjalin dengan baik.¹³

2. Kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

Dalam pengelolaan budget untuk peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar tentunya banyak kendala atau masalah yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah karena tanggung jawab pembiayaan sangatlah berat dan

¹¹Wawancara dengan bendahara MAN 5 Aceh Besar. Kamis, 11 januari 2018

¹²Wawancara dengan bendahara MAN 5 Aceh Besar. Kamis 11 januari 2018

¹³Observasi di MAN 5 Aceh Besar. Kamis 11 januari 2018

memerlukan masukan-masukan dari seluruh stakeholder yang ada di MAN 5 Aceh Besar, dimana stakeholder yang ada di sekolah banyak memberikan pendapat yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, maka dari itu kepala sekolah dapat mengambil dan memepertimbangkan pendapat dari seluruh guru-guru yang telah bermusyawarah tentang pendanaan, jika pembukuan pembiayaan yang ada di sekolah tidak jelas maka resiko sangatlah berat yang di dapatkan oleh sekolah, dari karna itu kepala sekolah sangat menekankan dan memberikan kebijakan yang sangat sesuai dengan ide guru-guru di sekolah. Adapaun kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar pertanyaan yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah pertanyaannya adalah, selama ibuk menjabat sebagai pemimpin di sekolah ini kendala apa yang sering ibuk hadapi? Jawaban dari kepala sekolah

Selama ibuk menjabat sebagai kepala sekolah di MAN 5 Aceh Besar ini adapun kendala yang sering ibuk hadapi salah satunya dalam pembentukan karakter siswa, dimana akhlak dan karakter sangatlah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena karakter merupakan faktor utama, jika peserta didik sudah berkarakter maka akan memudahkan guru dalam melakukan proses belajar mengajar dan saling menghargai dalam berinteraksi. Siswa kurang mengormati guru karena kurangnya perhatian dalam hal pendidikan dari orang tua dan tidak pernah mengevaluasi keadaan anak di sekolah sehingga anak kurang peduli dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah.¹⁴

Pertanyaan selanjutnya kepada kepala sekolah yang pertanyaannya adalah kedala apa saja yang ibuk hadapi dalam melakukan pengelolaan budgeting untuk peningkatan mutu di sekolah ini? jawaban dari kepala sekolah bahwa:

¹⁴Wawancara dengan kepala di MAN 5 Aceh Besar. Jum'at 12 januari 2018

Dalam pengelolaan budget kendala yang sering di hadapi yaitu pada saat melakukan musyawarah antara semua stakeholder yang ada di sekolah banyak yang beradu pendapat tentang bagaimana pengalokasian dana dan menentukan satuan harga barang yang akan dibeli untuk kepentingan sekolah dan memprioritaskan barang yang dapat meningkatkan mutu suatu pendidikan.¹⁵

Pertanyaan selanjutnya kepada kepala sekolah bagaiman solusi untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan? Jawaban dari kepala sekolah bahwa:

Adapun solusi yang ibuk berikan tergantung pada permasalahan yang dihadapi dari setiap kegiatan yaitu pada saat ini lahan untuk parkir masih belum ada dan ibuk sebagai pemimpin di sekolah ini berusaha untuk membangun area parkir pada saat dana sekolah sudah cair apabila dana tersebut tidak dibutuhkan untuk kepentingan yang lain, karena dana yang sekolah terima belum mencukupi untuk pembangunan area parkir. Permasalahan guru yang tidak profesional dengan bidangnya, harus ada pelatihan, workshof, dan seminar yang dapat meningkatkan pengetahuan guru sesuai dengan bidangnya masing-masing.¹⁶

Pertanyaan selanjutnya kepada bendahara pertanyaannya adalah apa yang dilakukan kepala sekolah jika ada konflik yang terjadi dalam peningkatan mutu di sekolah? Jawaban dari bendahara bahwa:

Kepala sekolah berusaha untuk memberikan arahan yang baik dan masukan sehingga tidak ada perselisihan antara guru dengan guru yang lain, karena dalam meningkatkan mutu butuh kerja sama yang baik sehingga perencanaan, pelaksanaan, organisasi, dan evaluasi berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sekolah.¹⁷

¹⁵Wawancara dengan kepala MAN 5 Aceh Besar. Jum'at 12 januari 2018

¹⁶Wawancara dengan kepala di MAN 5 Aceh Besar. Jum'at 12 januari 2018

¹⁷Wawancara dengan bendahara di MAN 5 Aceh Besar. Jum'at 12 januari 2018

Pertanyaan selanjutnya kepada bendahara pertanyaannya adalah, apa saja kendala dalam melakukan program di sekolah? Jawaban dari bendahara bahwa:

Untuk saat ini yang sering terjadi kekurangan dana dalam membuat suatu kegiatan karena tidak sesuai dana yang digunakan dengan program yang akan dilaksanakan di sekolah, disebabkan dana-dana banyak digunakan untuk kepentingan yang paling dibutuhkan, maka dari itu program sering tidak berjalan dengan baik, seperti pembangunan perpustakaan yang belum siap sampai saat ini.¹⁸

C. Pembahasan Penelitian

1. Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

Seseorang dinyatakan bijaksana di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja suatu keahlian dan tidak hanya di bidang tertentu juga bisa memberikan ide yang bagus untuk membuat suatu keputusan yang bermanfaat bagi rekan-rekan kerja dan orang yang di sekitarnya. Kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai keterampilan dan kebijakan tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya yang salah satunya pengelolaan pembiayaan di sekolah.

Kebijakan adalah suatu kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang atau strategi yang ada dalam diri seseorang untuk menunjukkan hal yang positif kepada orang yang ada di sekolah. Maka dari itu seorang kepala sekolah harus

¹⁸Wawancara dengan bendahara di MAN 5 Aceh Besar. Jum'at, 12 januari 2018

mempunyai kebijakan yang baik sehingga dalam menjabat sebagai pemimpin dapat memberi yang terbaik kepada rekan-rakan kerja dan siswa/i nya.

Adapun kebijakan kepala sekolah dalam pelaksanaan pengelolaan budgeting di MAN 5 Aceh Besar selama ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Kepala sekolah berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau kepala sekolah, usaha yang dilakukan mendapatkan tanggapan yang positif dari seluruh stakeholder yang merupakan faktor pendukung utama dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar.

Hal ini sesuai dengan teori Nanang Fattah dalam bukunya berjudul *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*: beliau menjelaskan bahwa:

Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pendidikan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dituntut agar dapat mengembangkan setiap warga yang siap memasuki era globalisasi yang penuh tantangan menghasilkan manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Dalam hubungan ini berbagai program pendidikan yang mengacu kepada tema pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan, meskipun sampai saat ini masih banyak permasalahan dan tantangan yang perlu mendapat perhatian.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa, betapa pentingnya kebijakan yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap pengelolaan budget untuk meningkatkan suatu pendidikan yang lebih berkualitas, sehingga nantinya dengan bermutunya pendidikan banyak yang berminat untuk masuk ke sekolah tersebut dan yang pastinya jika banyak siswa/i maka sekolah akan dapat mempertahankan kualitas mutu pendidikan.

¹⁹Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 92-93

2. Kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

Dari hasil penelitian yang peneliti wawancara bahwasanya tentang kendala terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan suatu tugas seorang kepala sekolah banyak terdapat permasalahan tentunya pada pengelolaan pembiayaan, dikarenakan pembiayaan sangatlah berat tanggung jawabnya maka dari itu seluruh stakeholder harus bekerja sama dengan kepala sekolah dalam mengelola pembiayaan.

Adapun hasil penelitian mengenai kendala terhadap pengelolaan budget dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar bahwa yang menjadi bukti banyaknya guru berbeda pendapat dalam melaksanakan sebuah kegiatan karena biaya yang akan digunakan sangatlah kurang.

Hal ini sesuai dengan teori Edgar C. Morphet dalam bukunya yang berjudul *The Economic and Pinancing of Education*, beliau menjelaskan bahwa:

Adapun dampak biaya pendidikan terhadap mutu proses dan hasil belajar dapat diukur sebagaimana asumsi sebagai berikut:

- a. Pendidikan diperhitungkan sebagai faktor penentu keberhasilan seseorang baik secara sosial maupun ekonomis. Pendidikan berupa aset moral adalah bentuk kemampuan, kecakapan, ketrampilan yang diperoleh melalui pendidikan dipandang sebagai suatu investasi. Pandangan ini diarahkan oleh premis Human Capifa/(SDM sebagai unsur modal). Berdasarkan premis tersebut, besarnya nilai biaya yang dipergunakan untuk pendidikan dipandang sebagai investasi yang ditanam pendidikan perlu memperhitungkan nilai manfaat (benefity atau keuntungan di masa yang akan datang.
- b. Biaya dan mutu pendidikan mempunyai keterkaitan secara langsung. Biaya pendidikan memberikan pengaruh yang positif melalui faktor kepemimpinan dan manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan yang

kompeten dalam meningkatkan pelayanan pendidikan melalui peningkatan mutu.

- c. Indikator penting yang dapat berpengaruh pada mutu atau kualitas pendidikan di antaranya adalah mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan dan alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum memadai.²⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya biaya di sekolah dan kerja sama dalam pengelolaan biaya maka suatu pendidikan tidak akan bermutu sesuai dengan visi misi sekolah yang telah di rencanakan di awal suatu kegiatan.

²⁰Edgar C. Morphet, *The Economic and Pinancing of Education, Fourth Edidon*, (New Jersey: Prenticce Hall Inc., Engelwood Chiff, 1983), h. 83.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar untuk saat ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, dan pengevaluasiannya yang dilakukan oleh seluruh stakholder yang ada di sekolah dan kerja sama dalam merencanakan semua kegiatan di sekolah tersebut. Bukan hanya hal yang sedemikian akan tetapi kepala sekolah melaksanakan tanggung jawab yang begitu berat. Adapun program yang dilakukan kepala sekolah MAN 5 Aceh Besar untuk meningkatkan mutu pendidikan ada beberapa program yang sudah bisa mengharumkan nama baik sekolah yaitu salah satunya dalam bidang olahraga.
2. Salah satu kendala kepala sekolah terhadap pengelolaan budgeting dalam peningkatan mutu pendidikan di MAN 5 Aceh Besar bahwa dana yang masuk ke sekolah masih kurang memadai sehingga kepala sekolah sulit untuk mengalokasikan dana karena dari berbagai bidang untuk meningkatkan mutu itu masih banyak butuh perbaikan yaitu salah satunya untuk pembangunan perpustakaan, perehapan ruang kelas, menyediakan

tempat untuk parkir, dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru.

B. Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dikemukakan antara lain.

1. Kepala sekolah, sebaiknya kedepannya lebih bijaksana dalam pengelolaan budget yaitu pengalokasian dana yang masuk ke sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah sehingga tidak mudah timbul permasalahan yang tidak diinginkan dalam menjalankan sebuah program yang sedang dilaksanakan di sekolah.
2. Kepada bendahara, sebaiknya kedepannya bendahara untuk lebih meningkatkan kerjasama yang baik dengan pimpinan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengalokasikan dana dan juga bendahara membuat laporan pengeluaran yang secara rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Choir. *Manajemen Mutu Terpadu. Modul Mata Kuliah Jurusan Kependidikan Islam*. Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
- Dedi Supriadi. (2003) *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Rosda Karya.
- Departemen Agama. (2003) *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah*. Bandung: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Sekolah.
- E Mulyasa. (2005) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- E Mulyasa. (2003) *Menjadi Kepala Sekolah Professional Dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- E. Mulyasa. (2003) *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Edward Sallis. (1993) *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page.
- Edgar C. Morphet, The Economic and Pinancing. (1983) *of Education, Fourth Edidon*. New Jersey: Prenticce Hall Inc., Engelwood Chiff.
- Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana. (2003) *Total Quality Management*. Yogyakarta.
- Hani Handoko. (2003) *Manajemen*. Yogyakarta.
- Hasbullah. (2006) *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harbangan Siagian. (1989) *Administrasi Pendidikan*. Semarang: Satya Wacana.
- Jerome S. Arcaro. (2005) *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martin. (2014) *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Matin. (2014) *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Nazir. (1985) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nanang Fattah. (2000) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2012) *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nanang Fattah. (2002) *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata dkk. (2008) *Pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurul Zuriah. (2009) *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Piet A Sahertian. Frans Mutaher. (1981) *Prinsip dan Tehnik supervisi pendidikan*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Rusdin Pohan. (2008) *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Banda Aceh: Ar-Rijal Institut.

- Syaiful Bahri Djamarah. (2000) *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi FF.duskatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafaruddin. (2008) *Efektifitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi, Dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Yang Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparlan. (2008) *Membangun Sekolah Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Suharsimi Arikunto. (1993) *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Udin Syaefudin Sa'ud, Abin Syamsuddin Makmun. (2005) *Perencanaan Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang SISDIKNAS*. (2003) Jakarta: Redaksi Siinar Grafika
- Umaid. (2004) *Manajemen Mutu Berbasis Sekolah*. Ciputat: Pusat Kajian Manajemen mutu pendidikan.
- William N. Dunn. (1999) *Public Policy Analysis Pengantar Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Wahyosumidjo. (2008) *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pers.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: B-11541/Un.08/FTK/KP.07.6/12/2017

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- og : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk Pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry; Banda Aceh
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang penetapan Institusi Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- tiken : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Manajemen Pendidikan Islam FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh tanggal 24 November 2017

MEMUTUSKAN

an :
A : Menunjuk Saudara:

1. Ismail Anshari sebagai Pembimbing Pertama
2. Nurussalami sebagai Pembimbing Kedua

untuk membimbing Skripsi:

Nama : Hapidah Aini

NIM : 140 206 064

Judul Skripsi : Kebijakan Pengelolaan *Budgeting* dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

: Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017

: Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Ganjil tahun Akademik 2018/2019

T : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Desember 2017
Rektor
M. Nurrahman

1. Rektor UIN Ar-Raniry (sebagai laporan);
2. Ketua Prodi MPI FTK
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: (0651) 7551423 - Fax: (0651) 7553020 Situs : www.tarbiyah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B-213/Un.08/TU-FTK/ TL.00/01/2018

09 Januari 2018

Lamp : -

Hal : Mohon Izin Untuk Mengumpul Data
Menyusun Skripsi

Kepada Yth.

Di -

Tempat

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan ini memohon kiranya saudara memberi izin dan bantuan kepada

Nama : Hapidah Aini
NIM : 140 206 064
Prodi / Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : VII
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam.
Alamat : Jl.Tgk. Dibrang 2 No.38 Darussalam Banda Aceh

Untuk mengumpulkan data pada:

MAN 5 Aceh Besar

Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry yang berjudul:

Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

Demikianlah harapan kami atas bantuan dan keizinan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.


An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha,
M. Said Farzah Ali

BAG.UM/UM BAG.UM/UM

Kode 6260



KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 ACEH BESAR
EMAIL : mancotgukemenag@yahoo.com
NPSN : 1 0 1 1 4 2 4 3

Jln. Lampeneurut –Peukan Biluy Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

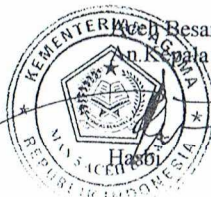
SURAT KETERANGAN
Nomor 080/Ma.01.39/02/2018

Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Aceh Besar dengan ini menerangkan:

Nama : Hapidah Aini
NIM : 1402 06064
Prodi / Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Semester : VII
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar –Raniry Darussalam

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar –Raniry, Nomor: B-213/Un.08/TU-FTK/TL.00/01/2018 Tanggal 11 Januari 2018, tentang Pengumpulan Data untuk Penyusunan Skripsi, maka dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengumpulkan data pada MAN 5 Aceh Besar sejak tanggal 11 s/d 14 Januari 2018 dalam rangka penelitian untuk penyelesaian Skripsi dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar”

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan semestinya.



Aceh Besar, 08 Februari 2018
Kepala Madrasah

Instrumen Observasi di MAN 5 Aceh Besar

No	Aspek yang di amati	Pelaksanaan			
		SB	B	C	K
1.	Memberikan kebebasan kepada guru untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran				
2.	Menjalin hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat				
3.	Program-program peningkatan mutu pendidikan				

Keterangan :

SB : Sangat Baik

B : Baik

C : Cukup

D : Kurang

Instrumen Wawancara dengan Kepala Sekolah MAN 5 Aceh Besar

Judul Skripsi: Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan MAN 5 Aceh Besar

1. Bagaimana kebijakan yang ibuk lakukan terhadap pengelolaan budget di sekolah ?
2. Menurut ibuk apa saja persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pengelolaan budget di sekolah?
3. Pernahkan ibuk mengevaluasi terhadap pengelolaan budget di sekolah ?
4. Apa saja program yang ibuk lakukan sehingga mutu pendidikan dapat meningkat?
5. Bagaimana tingkat keberhasilan peningkatan mutu pendidikan di sekolah?
6. Selama ibuk menjabat sebagai pemimpin di sekolah ini kendala apa yang sering ibuk hadapi?
7. Kendala apa saja yang ibuk hadapi dalam melakukan pengelolaan budgeting untuk peningkatan mutu di sekolah ini?
8. Bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program-program yang sedang berjalan?

Instrumen Wawancara dengan bendahara MAN 5 Aceh Besar

Judul Skripsi: Kebijakan Pengelolaan Budgeting dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN 5 Aceh Besar

1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan?
2. Menurut ibu apakah kepala sekolah telah melaksanakan kebijakan sesuai yang diharapkan?
3. Menurut ibu apakah pelaksanaan pengelolaan budget di sekolah ini sudah sesuai dengan prosedurnya?
4. Bagaimana penyusunan RKA di sekolah ini apa dibuat persemester ?
5. Apa yang dilakukan kepala sekolah jika ada konflik yang terjadi dalam peningkatan mutu disekolah?
6. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan program di sekolah?

Instrumen Dokumentasi di MAN 5 Aceh Besar

No	Dokumentasi yang mendukung hasil penelitian
1.	Membuat visi misi dan tujuan sekolah
2.	Menggunakan kurikulum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
3.	Pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan untuk peningkatan mutu di sekolah.
4.	Depan sekolah
5.	Kondisi lingkungan sekolah
6.	Gedung sekolah
7.	Suasana proses pembelajaran
8.	Sarana dan prasarana
9.	Jumlah pendidik
10.	Jumlah siswa
11.	Video, foto, rekaman suara kegiatan di sekolah

Dokumentasi penelitian di MAN 5 Aceh Besar



Wawancara dengan kepala sekolah MAN 5 Aceh Besar



Proses Pembelajaran di MAN 5 Aceh Besar



Wawancara dengan bendahara MAN 5 Aceh Besar



Penghargaan yang sering di dapatka MAN 5 Aceh Besar



keadaan lapangan MAN 5 Aceh Besar



keadaan parkir di MAN 5 Aceh Besar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : HAPIDAH AINI
Tempat/Tanggal Lahir : Rikit Gaib, 07 Maret 1995
Alamat : Banda Aceh, Darussalam, Jl Tgk di Blang II
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Gayo
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswi
IPK :
No. Hp : 0852 7590 4855

Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Alm. M.Kasim
 Pekerjaan :-
 b. Ibu : Sahiri
 Pekerjaan : IRT

Wali
 Nama : M.Yunus
 Pekerjaan : TANI
 Alamat : Rempelam, Rikit Gaib, Gayo Lues

Riwayat Pendidikan

1. SD Asal Rikit Gaib Tahun Tamat 2008
2. SMP N 1 Rikit Gaib Tahun Tamat 2011
3. SMA N 1 Rikit Gaib Tahun Tamat 2014
4. UIN Ar-Raniry Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tahun Tamat 2018

Banda Aceh, 04 juli 2018

Penulis

HAPIDAH AINI

